KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN

25 JULI-31 JULI 2026



085 - 169 - 767 - 212
@pemasyarakatanjogja

SAMBUTAN KAKANWIL



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dapat menyusun laporan kegiatan ini. Publikasi ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan, sekaligus menjadi sarana informasi mengenai berbagai program, kegiatan, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Seluruh kegiatan yang tersaji dalam laporan ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pembinaan warga binaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.



Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Kanwil Ditjenpas DIY secara menyeluruh, menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin maju, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

M. ALI SYEH BANNA

SINERGI PKBI DAN KANWIL DITJENPAS DIY PERJUANGKAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI ANAK



Yogyakarta – Bapas Kelas I Yogyakarta bersama PKBI DIY menggelar Forum Dialog Reintegrasi Sosial Anak bertema "Bersama Mengantar Anak Kembali ke Masyarakat" di Griya Abhipraya Purbonegoro, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan keluarga dalam mendukung reintegrasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Forum yang merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini diikuti oleh anak-anak dalam proses reintegrasi, perwakilan anak binaan LPKA, orang tua, tokoh masyarakat, pemerintah desa, akademisi, dan mitra pelatihan. PKBI DIY menjelaskan bahwa melalui Program INKLUSI yang berjalan sejak 2023 hingga 2028, pihaknya memberikan pendampingan berupa pengembangan minat dan bakat, konseling, penguatan keluarga, serta fasilitasi proses reintegrasi anak ke masyarakat.

Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menegaskan bahwa kolaborasi Bapas dan PKBI merupakan bukti kehadiran negara dalam mendukung pemulihan anak. Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menekankan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya bergantung pada pembimbingan, tetapi juga dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan agar anak dapat diterima kembali ditengah keluarga dan masyarakat tanpa stigma dan memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.



YOGYAKARTA – Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengikuti apel bersama yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (27/7). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar kementerian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.



Perkuat Sinergi Antar Kementerian, Jajaran Kemenko Kumham Imipas Gelar Apel Bersama

Bertindak selaku pembina apel, Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia, Novita Ilmaris, menekankan pentingnya membangun kerja sama yang solid di antara seluruh kementerian yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi yang erat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam amanatnya, Novita mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk terus memperkuat komunikasi, menjaga semangat kebersamaan, serta mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sinergi lintas kementerian diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan layanan yang lebih terintegrasi sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti apel bersama dengan penuh khidmat sebagai wujud komitmen mendukung penguatan koordinasi dan kolaborasi antarkementerian. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan semakin kokoh dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

AKSELERASI SDM UNGGUL, KANWIL DITJENPAS DIY DAN BPSDM IMIPAS RESMIKAN DIGITALISASI LAYANAN PK BANGKOM

YOGYAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) menjadi tuan rumah Sosialisasi Layanan Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK Bangkom) yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan (BPSDM Imipas) di Aula Semar Wicaksana, Selasa (28/7). Diikuti oleh pejabat manajerial dan pengelola kepegawaian dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-DIY, kegiatan ini bertujuan mematangkan mekanisme pemanfaatan aplikasi PK Bangkom guna mewujudkan pengelolaan pengembangan kompetensi ASN yang lebih efektif, terintegrasi, dan akuntabel.





Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, yang menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepala Pusat Pengembangan dan Penilaian Kompetensi BPSDM Imipas, Pujo Harinto, atas dipercayakannya Yogyakarta sebagai lokasi sosialisasi. Ali Syeh Banna menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan kunci utama perbaikan kualitas layanan publik di lingkungan pemasyarakatan.

"Pengembangan kompetensi adalah investasi penting untuk membangun SDM yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan organisasi. Pemanfaatan aplikasi PK Bangkom ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi manajemen ASN yang berdaya saing," ujarnya.

Materi sosialisasi disampaikan secara komprehensif oleh Kapusbang Penilaian Kompetensi BPSDM Imipas, Pujo Harinto, yang mengulas alur kerja aplikasi secara digital mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pemantauan kegiatan. Pujo mengajak seluruh peserta untuk menjadikan platform digital ini sebagai instrumen utama perencanaan kompetensi yang sistematis dan transparan. Kehadiran inovasi ini diharapkan tidak hanya menyederhanakan birokrasi pengusulan pelatihan, tetapi juga memastikan setiap program pengembangan kemampuan pegawai selaras dengan kebutuhan nyata organisasi.

Selama agenda berlangsung, para peserta berpartisipasi secara interaktif dengan melakukan simulasi dan praktik langsung penggunaan aplikasi PK Bangkom menggunakan laptop masing-masing. Diskusi hangat mengenai kendala teknis dan implementasi di tingkat UPT mewarnai jalannya acara. Melalui integrasi teknologi ini, jajaran Pemasyarakatan se-DIY siap mengakselerasi transformasi digital pengelolaan SDM demi mewujudkan aparatur Kemenimipas yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi.



Gala Wicara Pemasyarakatan Jogja Hadirkan Kepala Pusat Pengembangan dan Penilaian Kompetensi BPSDM Imipas Pujo Harinto, Tekankan Pentingnya Pengembangan Kompetensi ASN

Yogyakarta – Gala Wicara Pemasyarakatan Jogja menghadirkan Kepala Pusat Pengembangan dan Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pujo Harinto, sebagai bintang tamu spesial. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemasyarakatan untuk terus mengembangkan kompetensi sebagai bekal menghadapi tantangan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Selasa (28/7).

Pujo Harinto menegaskan bahwa pengembangan kompetensi bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan bagi setiap ASN. Menurutnya, ASN harus memiliki semangat belajar sepanjang hayat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu meningkatkan kapasitas diri agar dapat memberikan kinerja yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

Gala wicara juga mengulas Program Pengembangan Kompetensi (PK Bangkom) sebagai salah satu strategi BPSDM Imipas dalam mendukung peningkatan kualitas SDM. Melalui PK Bangkom, ASN didorong memanfaatkan berbagai metode pembelajaran, baik secara klasikal maupun digital, sehingga pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai kebutuhan organisasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh budaya belajar yang kuat di lingkungan Pemasyarakatan. Dengan ASN yang terus meningkatkan kompetensi, Pemasyarakatan akan semakin siap menghadirkan pelayanan yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan di era transformasi birokrasi.



KAPUS PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI BPSDM IMIPAS MOTIVASI WARGA BINAAN LAPAS YOGYAKARTA TERUS BELAJAR DAN BERKEMBANG

YOGYAKARTA – Kepala Pusat Pengembangan dan Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan (BPSDM Imipas), Pujo Harinto, memberikan motivasi kepada warga binaan Lapas Kelas IIA Yogyakarta agar terus memanfaatkan masa pembinaan sebagai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi diri, Selasa (28/7). Kegiatan tersebut dilaksanakan didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Ali Syeh Banna, beserta jajaran.

Dalam arahannya, Pujo Harinto mengajak warga binaan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti berbagai program pembinaan yang telah disediakan di dalam lapas. Menurutnya, masa pembinaan merupakan waktu yang tepat untuk memperkaya pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membangun karakter sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

"Mumpung masih memiliki kesempatan, teruslah belajar. Manfaatkan seluruh program pembinaan yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik," pesan Pujo Harinto kepada warga binaan.

Ia menambahkan bahwa proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan bukan sekadar menjalani masa pidana, tetapi menjadi sarana membentuk pribadi yang lebih baik, mandiri, dan produktif. Semangat belajar serta kemauan untuk terus memperbaiki diri menjadi modal penting bagi warga binaan dalam menjalani proses reintegrasi sosial.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan motivasi yang diberikan mampu menumbuhkan semangat warga binaan untuk terus mengembangkan kompetensi dan memanfaatkan setiap kesempatan belajar selama menjalani pembinaan. Dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif, warga binaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih siap, mandiri, dan bermanfaat.





Kakanwil Ditjenpas DIY Dampingi Kapus BPSDM Imipas Tinjau Pencatatan Register di Lapas Yogyakarta

YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Ali Syeh Banna, mendampingi Kepala Pusat Pengembangan dan Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan (BPSDM Imipas), Pujo Harinto, meninjau pelaksanaan pencatatan register di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Selasa (28/7). Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan administrasi pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang tertib, akurat, dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, Pujo Harinto meninjau proses pencatatan register yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi pemasyarakatan. Pencatatan register memiliki peran strategis sebagai dasar pengelolaan data warga binaan, sehingga harus dilaksanakan secara cermat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pujo Harinto menekankan bahwa tertib administrasi merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Menurutnya, kualitas pelayanan dan pembinaan tidak terlepas dari akurasi data yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, Muhammad Ali Syeh Banna menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Ditjenpas DIY terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola administrasi di seluruh Unit Pelaksana Teknis. Penguatan terhadap pencatatan register menjadi salah satu upaya untuk memastikan setiap proses administrasi berjalan secara profesional, akuntabel, dan mendukung pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas.

Melalui peninjauan ini, diharapkan pelaksanaan pencatatan register di lingkungan pemasyarakatan semakin optimal serta mampu mendukung penyelenggaraan layanan dan pembinaan yang tertib administrasi. Kanwil Ditjenpas DIY juga berkomitmen terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar setiap proses administrasi berjalan sesuai standar dan mendukung terwujudnya tata kelola pemasyarakatan yang semakin baik.



KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT KUALITAS LAYANAN LEWAT WORKSHOP OMBUDSMAN

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) mengikuti Workshop Persiapan Penilaian Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY di Kompleks Kepatihan DIY, Rabu (29/7). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, dan penyelenggara pelayanan publik se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah DIY menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian maladministrasi oleh Ombudsman diharapkan menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Workshop menghadirkan materi mengenai service excellence serta mekanisme Penilaian Maladministrasi Tahun 2026. Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menegaskan bahwa kegiatan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya pelayanan publik di seluruh jajaran Pemasyarakatan, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian.

Melalui workshop ini, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat standar layanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta kompetensi petugas. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari maladministrasi.





YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, memberikan pelatihan pijat energy kepada jajaran pegawai Kanwil Ditjenpas DIY, Rabu (29/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun kepedulian sosial sekaligus membekali pegawai dengan keterampilan sederhana yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Bertempat di Aula Semar Nawasena Kanwil Ditjenpas DIY, kegiatan diawali dengan latihan pernapasan yang dipandu secara langsung oleh Kakanwil. Seluruh pegawai mengikuti setiap tahapan dengan penuh khidmat dan antusias sebagai bekal sebelum memasuki sesi praktik pijat energy.

Pada sesi berikutnya, peserta mendapatkan pelatihan teknik dasar pijat energy yang dapat diterapkan untuk membantu meredakan keluhan fisik ringan. Pelatihan berlangsung interaktif, di mana para pegawai mempraktikkan teknik-teknik yang diajarkan secara berpasangan dengan pendampingan langsung.

Dalam arahannya, Muhammad Ali Syeh Banna menyampaikan bahwa keterampilan tersebut bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan sarana untuk menebarkan manfaat kepada sesama. Menurutnya, setiap ilmu yang dimiliki akan bernilai ibadah apabila digunakan untuk membantu orang lain dengan niat yang tulus.

Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk terus menumbuhkan budaya saling peduli dan saling menolong, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, semangat berbagi manfaat merupakan bagian dari nilai-nilai pengabdian seorang aparatur sipil negara yang harus senantiasa dijaga.



Tebar Kebaikan untuk Sesama, Kakanwil Ditjenpas DIY Beri Pelatihan Terapi Energy bagi Pegawai

PERKUAT BENTENG ANTI NARKOBA

Kanwil Ditjenpas DIY dan BNNP DIY Mantapkan Sinergi Pertahankan Lapas-Rutan bersih Narkoba

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara kedua instansi pada Rabu (29/7).

Pertemuan yang dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, dan Kepala BNNP DIY, Brigjen Pol. Faried Zulkarnain, membahas langkah-langkah strategis untuk mempertahankan capaian seluruh Lapas dan Rutan di DIY yang hingga kini tetap bersih dari narkoba. Kedua pihak sepakat bahwa upaya pencegahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas instansi.





Muhammad Ali Syeh Banna menyampaikan apresiasi atas dukungan BNNP DIY dalam mendukung terciptanya lingkungan Pemasyarakatan yang aman dan kondusif. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi kunci keberhasilan pembinaan warga binaan, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, Brigjen Pol. Faried Zulkarnain menegaskan kesiapan BNNP DIY untuk terus mendukung berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui tes urine, razia bersama, serta program rehabilitasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempertahankan Lapas dan Rutan di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap bersih dari narkoba serta menjadi contoh praktik baik dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berintegritas.

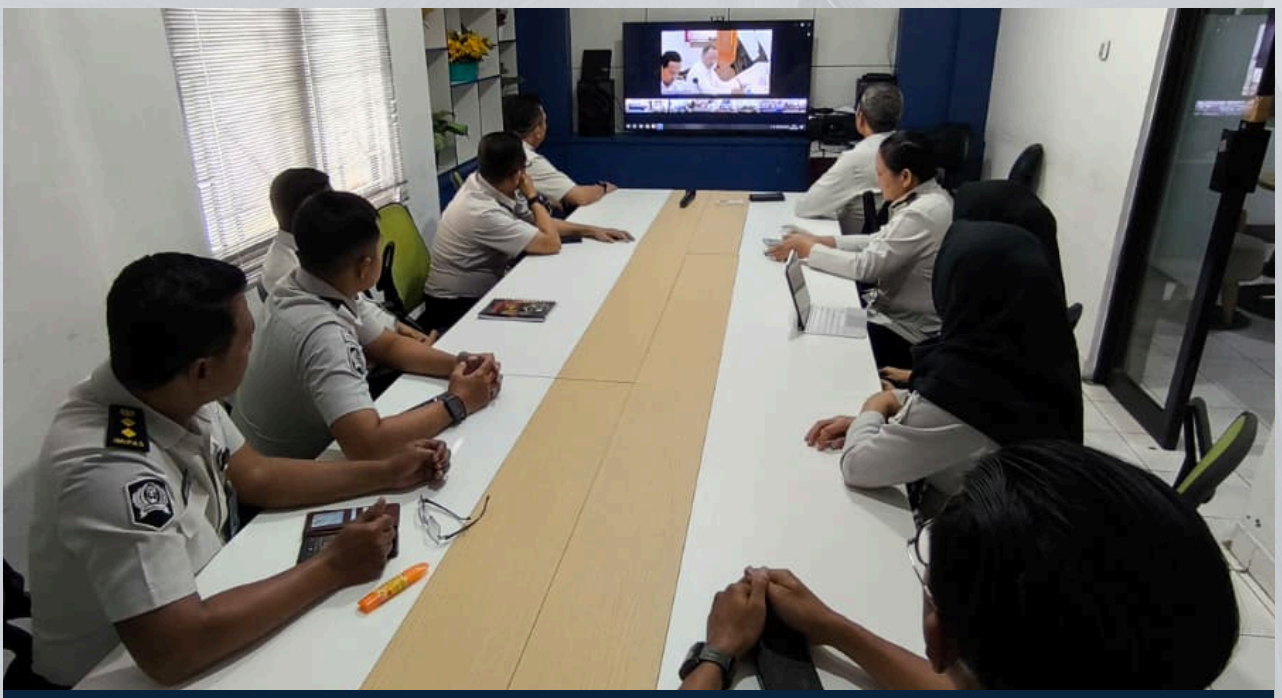

KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI PENGARAHAN DIRJENPAS, SIAPKAN HUT KE-81 RI HINGGA PERKUAT PENGAMANAN UPT

YOGYAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan D.I. Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-DIY mengikuti kegiatan Pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara virtual dari Ruang Rapat Lt. II Kanwil Ditjenpas DIY, Rabu (29/7). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menginstruksikan seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan untuk menyemarakkan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 serta mempersiapkan pelaksanaan pemberian Remisi Umum Kemerdekaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dirjenpas menegaskan pentingnya peningkatan pengamanan di seluruh UPT, pemenuhan standar kualitas dan kuantitas bahan makanan bagi warga binaan, optimalisasi peran koperasi pegawai melalui INKOPASINDO, hingga pemanfaatan sarana komunikasi resmi Wartelsuspas untuk mencegah peredaran telepon genggam secara ilegal di dalam Lapas dan Rutan.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil Ditjenpas DIY mencatatkan sejumlah raihan kinerja positif secara nasional. Salah satunya, pengelolaan layanan komunikasi Wartelsuspas Kanwil Ditjenpas DIY berhasil meraih peringkat ke-2 terbaik tingkat nasional. Di samping itu, pengelolaan INKOPASINDO di wilayah DIY juga menorehkan capaian baik. Kanwil Ditjenpas DIY juga telah merampungkan pengiriman data usulan Amnesti ke pusat sesuai tenggat waktu serta mengoordinasikan pelaksanaan Remisi Umum bersama Pemerintah Provinsi DIY.

Menanggapi arahan pimpinan pusat, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menegaskan komitmen seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti setiap instruksi secara konsisten. Melalui penguatan disiplin, sinergi, dan integritas, Kanwil Ditjenpas DIY siap mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan guna mewujudkan tata kelola Pemasyarakatan yang semakin profesional, adaptif, dan akuntabel di D.I. Yogyakarta.



TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI, PENYULUH HUKUM KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI BIMTEK PUBLIC SPEAKING

YOGYAKARTA – Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Public Speaking yang diselenggarakan secara hibrid oleh BPHN Kementerian Hukum, Rabu (29/7). Mengusung tema **"Komunikasi Efektif Dalam Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Hukum Kepada Masyarakat",** kegiatan ini diikuti oleh 505 peserta dari berbagai instansi guna mengoptimalkan peran pelayan publik dalam penyebaran informasi hukum.

Narasumber Bimtek, Rudy Andanu, menekankan tiga unsur penting dalam penyuluhan, yaitu *mindset*, *content*, dan *delivery*. Ia menggarisbawahi pentingnya kemampuan Penyuluh Hukum dalam menerjemahkan bahasa hukum yang kompleks menjadi bahasa yang membumi dan mudah dipahami masyarakat awam. Penguasaan materi secara komprehensif serta pendekatan emosional kepada audiens menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.





Bimtek ini juga menyoroti peran strategis Penyuluh Hukum dalam merespons dinamika sosial, termasuk menekan maraknya aksi main hakim sendiri melalui edukasi yang persuasif. Guna mengatasi rasa gugup *(nervous)*, peserta dibekali penguatan mental yang adaptif dan siap belajar dari kesalahan, dengan tetap menjunjung tinggi etika serta estetika sebagai pelayan publik *(public servant)*.

Melalui sesi diskusi interaktif dan praktik langsung, seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan lancar. Keikutsertaan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Ditjenpas DIY dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi hukum dan mendorong terwujudnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang semakin taat hukum.



PERKUAT SOLIDARITAS DAN KINERJA, IPKEMINDO DIY BAHAS PEDOMAN PRAKTIS HINGGA AKSI SOSIAL

YOGYAKARTA – Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat koordinasi di Aula Semar Wicaksana Lantai 1 Kanwil Ditjenpas DIY pada Rabu (29/7). Pertemuan yang dihadiri jajaran pengurus dan pimpinan organisasi ini membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari finalisasi Draft Buku Pedoman Praktis Pembimbing Kemasyarakatan DIY hingga rencana aksi kepedulian sosial bagi masyarakat terdampak kekeringan.

Dalam pembahasan pedoman tugas, pengurus menyepakati penyempurnaan draft buku yang ditargetkan rilis pada Agustus mendatang atas nama IPKEMINDO DIY. Selain itu, forum juga menyepakati penyaluran bantuan sosial berupa 10 tangki air bersih untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul yang terdampak musim kemarau. Kegiatan kepedulian masyarakat ini didanai melalui skema kolaboratif antara kas organisasi dan iuran anggota.

Tak hanya program kerja eksternal, rapat juga menetapkan skema penguatan kesejahteraan serta transparansi finansial bagi seluruh anggota. IPKEMINDO DIY menyepakati pemberian cinderamata bagi anggota yang purna tugas atau mutasi, santunan bagi yang sakit berat, serta komitmen penyampaian laporan keuangan secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat terus membina kebersamaan dan keterbukaan di dalam tubuh organisasi.





Sebagai penutup, forum berdiskusi mengenai isu teknis pelaksanaan pidana pengganti denda bagi anak, khususnya terkait opsi pelatihan kerja di Griya Abhipraya atau Bapas. Melalui ruang diskusi yang direncanakan berlangsung lebih rutin, IPKEMINDO DIY berkomitmen untuk menyamakan persepsi Pembimbing Kemasyarakatan demi optimalisasi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di wilayah DIY.

SINERGI LINTAS INSTANSI PERKUAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI YOGYAKARTA



YOGYAKARTA – Penguatan sinergi antarinstansi dalam implementasi keadilan restoratif *(Restorative Justice)* menjadi fokus utama audiensi antara Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, dengan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, Kamis (30/7). Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, turut mendampingi kegiatan yang merupakan bagian dari Sinkronisasi dan Koordinasi Agenda Pembangunan Nasional di Bidang Hukum sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024.

Audiensi ini menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan serta merumuskan langkah strategis demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis. Melalui pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana difokuskan pada pemulihan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi terkait isu-isu strategis penegakan hukum di wilayah D.I. Yogyakarta.

Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh kebijakan tersebut melalui fungsi pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi yang erat antar-aparat penegak hukum menjadi kunci utama agar keadilan restoratif dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong proses reintegrasi sosial bagi warga binaan secara optimal.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Kemenko Kumham Imipas, Staf Ahli Menko, serta para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan DIY. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor ini, diharapkan implementasi agenda pembangunan nasional di bidang hukum dapat berjalan semakin efektif, selaras, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.











PERKUAT SINERGI ANTAR KEMENTERIAN

Kemenko Kumham Imipas Gelar Sinkronisasi dan Koordinasi Tusi di DIY

YOGYAKARTA– Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Tugas dan Fungsi (Tusi) Kemenko Bidang Kumham Imipas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Jumat (31/7).

Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, memimpin langsung kegiatan internalisasi tusi Kemenko kepada jajaran Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam arahannya, Nofli menekankan bahwa kolaborasi dan kesamaan persepsi lintas kementerian merupakan kunci utama untuk membangun sinergi yang kuat, menyelaraskan kebijakan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat wilayah.

Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, mewakili jajaran kementerian di wilayah DIY menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen Kemenko Kumham Imipas yang hadir langsung di daerah. Kehadiran ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program strategis nasional serta memperkokoh koordinasi antarinstansi dalam mendukung penegakan hukum di Yogyakarta.





"Atas nama seluruh jajaran di Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Kemenko Kumham Imipas. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun kolaborasi yang semakin erat antarinstansi," ujar Ali Syeh.

Ia berharap hasil dari kegiatan sinkronisasi dan koordinasi ini dapat menjadi landasan dalam meningkatkan sinergi antarunit kerja di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas, sehingga setiap kementerian dan instansi mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara terintegrasi, selaras, dan saling mendukung demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui forum ini, semangat kolaborasi antar kementerian di lingkungan Kemenko Kumham Imipas diharapkan semakin kokoh, sekaligus memperkuat implementasi kebijakan pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI REKONSILIASI DATA DAN COACHING CLINIC HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI TAHUN 2026

Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data dan Coaching Clinic Hukuman Disiplin Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat. Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta administrator aplikasi Caraka fitur hukuman disiplin dari seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat tata kelola pengelolaan hukuman disiplin pegawai.

Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data dan Coaching Clinic Hukuman Disiplin Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat. Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta administrator aplikasi Caraka fitur hukuman disiplin dari seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat tata kelola pengelolaan hukuman disiplin pegawai.





Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh berbagai materi strategis, mulai dari tata cara penjatuhan hukuman disiplin oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), banding administratif oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), hingga sosialisasi konflik kepentingan dari Kementerian PANRB. Kegiatan juga diisi dengan rekonsiliasi dan pemutakhiran data hukuman disiplin, coaching clinic, serta rembuk integritas untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan beserta langkah penyelesaiannya.

Melalui kegiatan ini, dihasilkan data hukuman disiplin pegawai yang lebih akurat dan mutakhir sebagai dasar penguatan tata kelola kepegawaian. Selain itu, kompetensi pengelola kepegawaian dalam pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan hukuman disiplin turut meningkat, sehingga mampu mendukung penegakan kepatuhan internal serta menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Ditjenpas DIY akan memperkuat implementasi hasil kegiatan melalui sosialisasi pengelolaan hukuman disiplin kepada seluruh pengelola kepegawaian di jajaran satuan kerja, disertai monitoring, evaluasi, dan pembinaan secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Pemasyarakatan.

KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY,

Muhammad Ali Syeh Banna



MUHAMMAD ALI SYEH BANNA
KAKANWIL DITJENPAS DIY